




Research Article

Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang Dalam Menanggulangi Putus Sekolah

Farchan Nurhakim¹, Wasehudin², Encep Syarifudin³, Agus Gunawan⁴

1. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Indonesia
E-mail: farchannurhakim@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Indonesia
E-mail: wasehudin@uinbanten.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Indonesia
E-mail: encep.syarifudin@uinbanten.ac.id
4. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Indonesia
E-mail: agusgunawan1405@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 14, 2025
Accepted : August 12, 2025

Revised : June 15, 2025
Available online : September 27, 2025

How to Cite: Farchan Nurhakim, Wasehudin, Encep Syarifudin and Agus Gunawan (2025) "Tangerang Regency Government Policy in Addressing School Dropouts", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), pp. 2100–2110. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i3.1653.

Tangerang Regency Government Policy in Addressing School Dropouts

Abstract. This article discusses the extent of the causes and efforts that the government can take to overcome school dropout in Tangerang Regency. The type of research used in this research is qualitative narrative. The results of the research will be in the form of data excerpts from the origins

of interviews, photos, field notes, personal documents, voice recordings and other documents. This research wants to discuss (1) The causes of children dropping out of school, namely: the economic situation of the family, the educational background of the father and mother, the status of the father in society as well as employment and social psychological correlation between parents and between children and parents, (2) Policy Analysis Regional government in overcoming school dropouts in: (a) Optimizing the distribution of scholarships through BOS funds, KIP, family hope events, and/or similar assistance, (b) Regional government and school principals encourage the community, public figures, DUDI, to encourage completion of education according to the level, (c) Counseling and guidance for children's parents by the Education Department, (d) Strengthening family education.

Keywords: Government Policy, Education, School Dropout.

Abstract. Artikel ini membahas sejauh mana penyebab dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi putus sekolah di Kabupaten Tangerang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif naratif. Hasil penelitian akan berupa kutipan data asal usul wawancara, foto, catatan lapangan, dokumen pribadi, rekaman suara dan dokumen lainnya. Penelitian ini ingin membahas (1) Penyebab anak putus sekolah yaitu: keadaan ekonomi keluarga, latar belakang pendidikan ayah dan ibu, status ayah dalam masyarakat serta pekerjaan dan korelasi sosial psikologis. antara orang tua dan antara anak dengan orang tua, (2) Kebijakan Pemerintah daerah dalam mengatasi putus sekolah dalam: (a) Optimalisasi penyaluran beasiswa melalui dana BOS, KIP, acara keluarga harapan, dan/atau bantuan sejenis, (b) Pemerintah Daerah dan kepala sekolah mendorong masyarakat, tokoh masyarakat, DUDI untuk mendorong penyelesaian pendidikan sesuai jenjangnya, (c) Penyuluhan dan bimbingan orang tua anak oleh Dinas Pendidikan, (d) Penguatan pendidikan keluarga.

Keywords: Kebijakan Pemerintah, Pendidikan, Putus Sekolah.

PENDAHULUAN

Hak, kewenangan serta kewajiban daerah otonomi buat mengurus serta mengatur dengan urusan pemerintahan dan penting masyarakat sinkron memakai aturan undang-undang dianggap otonomi daerah. Berdasarkan keyakinan Hoesin bahwa yang dimaksud dengan "otonomi" adalah kebebasan mengambil keputusan berdasarkan tujuan sendiri bagi orang-orang dengan status tersebut yang tidak berada dari kendali pemerintah pusat. (RI, 2018) Pasal 49 Undang-Undang angka 20 Tahun 2003 ihwal Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa 1) Dana pendidikan selain gaji pengajar dan biaya pendidikan dinas dialokasikan sekurang-kurangnya 20% asal anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sekurang-kurangnya 20% asal aturan Pendapatan serta Belanja Negara (APBN). anggaran Pendapatan serta Belanja daerah (APBD) buat sektor pendidikan. 2) aturan Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) mengalokasikan gaji guru serta dosen yg diangkat pemerintah. 3) hadiah dipergunakan buat menyalurkan dana pendidikan pemda buat satuan pendidikan sinkron dengan aturan yang dirancang. 4) Pemerintah Daerah menerima dana pendidikan berasal pemerintah pada bentuk hadiah sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (lima) Peraturan Pemerintah

mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud di ayat (1), (2), (3), dan (4). (Habe & Ahiruddin, 2017)

Melihat dari BPS (Badan Pusat Statistik) dimana angka anak tidak sekolah sebagai berikut:

Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin 2019-2021

Tabel 1

Jenis Kelamin + Jumlah	Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin								
	SD / Sederajat			SMP / Sederajat			SMA / Sederajat		
	2019			2020			2021		
Laki-Laki	1.00	0.72	0.75	7.59	8.42	7.56	25.17	23.57	23.14
Perempuan	0.69	0.52	0.55	6.22	6.08	5.96	22.24	21.00	19.76
Laki-Laki + Perempuan	0.85	0.62	0.65	6.92	7.29	6.77	23.75	22.31	21.47

Sumber: (Susenas, BPS Source Url:

<https://www.bps.go.id/indicator/28/1986/1/angka-anaktidak-sekolah-menurut-jenjang-pendidikan-dan-jenis-kelamin.html> Access Time: February 14, 2023, 8:30 pm)

Adapun statistik Provinsi Banten Dinas Pendidikan Angka Putus Sekolah sebagai berikut:

Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA di Provinsi Banten

Tabel 2

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Jumlah Capaian Kinerja APS SMA/SMK/MA	Jumlah Seluruh APS SMA/SMK/MA	Persentase
1	Provinsi Banten	2019	12.869	444.694	2,89%
2	Provinsi Banten	2018	97	12.387	0.78 %

Sumber: (Statistik Provinsi Banten Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

Jumlah Angka Putus Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Tangerang

Tabel 2

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Pendidikan	Jumlah Putus Sekolah
1	Kab. Tangerang	2021	SMP	1900
2	Kab. Tangerang	2022	SD dan SMP	2974

Sumber: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang)

Melihat dari fenomena diatas penulis tertarik meneliti sejauh mana anak putus sekolah di Kabupaten Tangerang, melihat dari statistik BPS (Badan Pusat Statistik) dan Statistik Provinsi Banten Dinas Pendidikan dan Kebudayaan angka putus sekolah lumayan tinggi. Padahal Pemerintah sudah memberikan KIP (Kartu Indonesia Pintar) diberikan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah, otomatis ada permasalahan juga dari pihak orang tua dan anak seperti: kurangnya keharmonisan orangtua, tidaknya minat sekolah anak, faktor lingkungan, hancurnya psikologi anak di sekolah dan masih banyak lagi.

Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Tangerang membuat kebijakan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kabupaten Tangerang: Peraturan Bupati Tangerang nomor 27 Tahun 2020 perihal Petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan biaya Pendidikan Bagi rakyat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Tangerang BAB I Ketentuan umum Pasal 1 pada Peraturan Bupati ini yang dimaksud menggunakan: Point 11-16. (11) bantuan porto Pendidikan ialah bantuan biaya yg diberikan kepada siswa berasal masyarakat berpenghasilan rendah yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pendataan serta verifikasi dari Dinas Pendidikan dan ditetapkan sebagai penerima bantuan biaya berdasarkan Keputusan Bupati untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. (12) Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli. (13) Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. (14) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. (15) Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD. (16) Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD. (TANGERANG & BANTEN, 2020)

Ada 22.194 orang yang putus sekolah di Kabupaten Tangerang. Orang-orang ini terbagi dalam dua kategori: Drop Out (DO) atau berhenti begitu saja, dan Lulus Tanpa Melanjutkan (LTM). Angka DO mencapai 2.543 dan angka LTM mencapai 7.251 di tingkat Sekolah Dasar (SD). Sebaliknya, ada 1.636 anak yang mengalami DO di tingkat SMP, sedangkan LTM sebanyak 8.623. Sedangkan angka putus sekolah SMA sederajat mencapai 2.104. Eny Suhaeni, anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang, mengaku sangat prihatin dengan tingginya angka putus sekolah akibat hal tersebut. Eny menegaskan, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Provinsi Banten wajib mengusut faktor penyebab anak putus sekolah. Akibatnya, solusi langsung untuk masalah ini dapat ditemukan. Secara alami, itu sangat mengkhawatirkan dengan jumlah yang begitu besar. Padahal sekolah negeri dari SD sampai SMA saat ini gratis kan? Ungkap perempuan yang biasa disapa Eny itu. (wartaekonomi.co.id : Jum'at, 05 Agustus 2022, 18:17 WIB)

Dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri, maju dan sejahtera yang berkualitas dengan membangun keunggulan di setiap daerah dan didukung oleh kemampuan sumber daya insan yang berkualitas, sesuai dengan visi serta misi pembangunan Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kabupaten Tangerang bertugas menanggung dan pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan dan meningkatkan pendidikan untuk menanggung hak masyarakat untuk masuk ke lembaga pendidikan. Oleh karena itu, berdasarkan konteks tersebut, penulis ingin meneliti untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi keberhentian sekolah di Kabupaten Tangerang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif artinya menggambarkan suatu keadaan atau fenomena sumber yang ada. Subjek penelitian tidak dimanipulasi dengan cara apa pun, dan semua aktivitas dan acara berlanjut sebagaimana adanya. Peneliti ingin mendeskripsikan sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yg dipelajarinya secara sistematis, faktual, dan seksama mengenai analisis kebijakan pemerintahan daerah dalam menanggulangi putus sekolah di Kabupaten Tangerang. (Sukmadinata, 2005) Data diambil dari hasil wawancara, foto, rekaman suara, catatan di lapangan, catatan pribadi dan dokumen lainnya akan dicantumkan dalam laporan penelitian. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tangerang. Observasi dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dan keluarga anak putus sekolah.

Penulis memperoleh data yang diperlukan melalui penggunaan informan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dan anak putus sekolah menjadi informan dalam penelitian ini. Pemilihan informan ini didasarkan pada asumsi bahwa individu yang terpilih bisa menyampaikan info secara akurat sinkron dengan tujuan dan masalah yang ingin diteliti. Karena para informan ini dapat memberikan informasi tentang data tulisan yang diperlukan, dimungkinkan untuk menambah jumlah informan (snowball sampling) di lapangan untuk penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Anak Putus Sekolah

Anak yang putus sekolah itu harus diperhatikan dari kalangan keluarga, masyarakat dan pemerintahan. Karena pendidikan itu sangat penting untuk meningkatkan karakteristik anak yang baik, menuntut ilmu, menggapai cita-citanya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini peneliti ingin memfokuskan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi anak yang putus sekolah, akan tetapi agar tujuan itu tercapai pemerintah juga butuh kerja sama dengan pihak keluarga maupun masyarakat. Karena bila sudah di beri fasilitas oleh pemerintah tetapi dari pihak anaknya sulit di kendalikan itu akan membuat dampak buruk untuk anak.

Sebagian besar anak berhenti sekolah karena kesulitan ekonomi karena orang tua tidak sanggup membiayai pendidikannya.(Bagong Suyanto, 2010) Serangkaian penjelasan tentang faktor utama yang menyebabkan anak berhenti. Berikut ini faktor-faktor diantaranya:

1. Faktor Internal
 - a. Anak yang berhenti sekolah melakukannya sebab tak mau sekolah sebab merasa rendah diri, sebab tak bisa bersosialisasi menggunakan lingkungan sekolahnya, karena tak mampu membiayai sekolahnya, dan tidak mampu. dipengaruhi oleh berbagai faktor. Masalah psikologis anak-anak diperburuk oleh ketidakmampuan keluarga untuk membiayai pendidikan mereka, yang menghalangi mereka untuk berinteraksi dengan baik dengan teman sekelasnya; lingkungan juga berperan.
 - b. Imbas teman-temannya, ia diajak bermain beserta game seperti play station. di akhirnya, dia acapkali membolos serta tidak pernah muncul, yang merusak nilainya dan membuatnya merasa malu untuk kembali ke sekolah. Intinya, selain keinginan individu, perilaku anak sangat dipengaruhi oleh lingkungannya dalam hal ini teman sebaya;
 - c. Ketika anak-anak dihukum karena terlambat ke sekolah, mereka putus sekolah. Dalam pelaksanaannya, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang selalu diarahkan untuk mencapai cita-cita hukum dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Setiap lembaga pendidikan di dunia menggunakan sanksi untuk menjaga ketertiban dan disiplin siswa nya. Biasanya ada tiga tahapan penerapan sanksi: sanksi ringan berupa teguran verbal, hukuman sedang berupa teguran ekspresi serta tertulis pada anak dan orang tuanya, serta hukuman berat berupa skorsing atau putus sekolah.
 - d. Tak perlu dikatakan bahwa penegakan sanksi akan berdampak positif bagi siswa namun, tidak banyak dari mereka yang memandangnya sebagai bentuk siksaan

yang membuat siswa enggan untuk bersekolah bahkan sampai membuat mereka malu dan marah dengan sanksi tersebut. (Ignas Kleden, 2004)

2. Faktor Eksternal

- a. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali harus ikut membantu keuangan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya, mereka merasa terbebani oleh masalah keuangan ini, yang menghalangi mereka untuk mengikuti kegiatan sekolah dan mempersulit mereka untuk mengikuti pelajaran. Akibatnya, situasi ekonomi yang tidak stabil memungkinkan seseorang anak buat mencari cara buat menutupi biaya hidup famili, waktu sorang anak yang sedang pada umurnya untuk bersekolah harusnya berkonsentrasi buat mengikuti setiap proses pembelajaran disekolah;
- b. Ketiadaan perhatian orang tua umumnya menyebabkan aneka macam dilema. Semakin akbar berukuran anak, semakin dibutuhkan pengertian atau peduli kasih dari orang tua, dengan macam cara dan sesuai kesanggupannya. Kurangnya perhatian orang tua adalah salah satu faktor penyebab kenakalan anak. sebab anak di hakekatnya ialah generasi penerus, maka mereka perlu menerima sikap yang sempurna guna menjaga kepribadian anak agar tak menyimpang berasal istiadat-adat sosial. Seharusnya orang tua yg berpikir dan bertindak menjadi teladan bagi anaknya serta sebagai kawasan anak mengadu dan menerima bantuan. agama dan budaya;
- c. Terjadi hubungan yang tidak harmonis antara orang tua (broken family). Kondisi anak, maupun perilakunya terhadap orang lain dan alam, akan dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang hingar bingar dan penuh dengan aktivitas negatif seperti dulu. Disfungsi keluarga dapat memanifestasikan dirinya dalam bentuk perceraian orang tua, kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan satu sama lain di antara anggota keluarga, dan ketidakmampuan anak untuk berhasil di sekolah seringkali merupakan akibatnya. (Simon Danes dan P. Hardono Hadi, 2000)

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tangerang anak yang putus sekolah. Setiap keluarga yang memiliki anak putus sekolah diwawancarai sebanyak tiga kali. Peneliti mewawancarai keluarga yang keadaan ekonominya terbatas, menyebabkan anak-anak mau membantu mereka bekerja sehingga tidak sekolah. Selain itu, orang tua yang hanya tamat SD atau sederajat kurang menyadari pentingnya pendidikan bagi anaknya. Kemudian, anak-anak lebih mungkin mendaftar di pesantren jika dikelilingi oleh teman sebaya yang juga putus sekolah. Dalam wawancara dengan keluarga pertama pada (7 Januari 2023) Pak Aman dan Bu Minah berpesan kepada anak-anaknya untuk tetap semangat sekolah akan tetapi Dika tidak ingin sekolah, karena Dika ingin pesantren dia juga tidak mau sekolah, dari segi ekonomi Ibu Minah rendah akan tetapi beliau tidak mau memperlihatkan kepada anaknya walaupun ekonominya rendah, walaupun pas-pasan dalam ekonominya akan tetapi anak tersebut bersih keras tidak mau sekolah justru anak tersebut ingin pesantren. Padahal ketika proses pembelajaran di SMA anak tersebut tidak mempunyai tekanan apapun, memang sudah keputusan anak tersebut ingin pesantren, Dika sudah terus terang kepada orangtuanya. Ibu Minah mengambil keputusan kepada anaknya mau sekolah atau tidak, akan tetapi Dika menjawab tidak mau sekolah bersih keras ingin pesantren, karena ada faktor lingkungan juga, karena teman-teman Dika pun

pesantren. Dika lebih suka mengaji dan juga bisa mengajarkan ngaji sedikit-sedikit kepada orang lain. Cita-cita Dika juga ingin menjadi guru ngaji.

Wawancara pada keluarga kedua (tanggal 14 Januari 2023), keluarga Bapak Ardi dan Ibu Rasti yaitu dengan anaknya bernama Vellyn, anak tersebut broken home alasannya tidak melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi karena Vellyn ingin lebih fokus bekerja mungkin yah, padahal dari faktor keluarga tidak ada, justru orang tuanya mendukung ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi Cuma keinginan sendiri anaknya tidak mau melanjutkan pendidikan, anak tersebut lebih tertarik mencari uang sendiri. Walaupun Vellyne mempunyai penghasilan sendiri dia bersih keras tidak mau melanjutkan pendidikan, dia lebih tertarik dengan dunia perbisnisan untuk sekarang tidak mau ke pendidikan. Cita-cita bisa digapai dengan kita sendiri bukan berarti pendidikan tinggi itu mereka semua bakal mendapatkan impian mereka masing-masing, justru kita usaha sendiri dan kita punya tujuan perbisnisan tanpa kuliah juga kita menurut dia bisa. Bukan berarti orang-orang yang berpendidikan tinggi itu akan sukses, bisa saja seseorang yang pendidikan rendah pun akan sukses tanpa harus melanjutkan pendidikan, dia tertarik dengan dunia perbisnisan dia akan mempelajari ilmu tersebut dengan sungguh-sungguh. Walaupun broken home orang tuanya padahal sanggup memberikan pendidikan yang lebih tinggi akan tetapi Vellyne tidak tertarik dengan pendidikan, justru dia tertarik dengan dunia bisnis.

Wawancara pada keluarga ketiga (tanggal 21 Januari 2023), yaitu bernama Kholilah, ia putus sekolah di karena kan proses pembelajaran kurang maksimal peserta didik ini jarang masuk dan jarang mengerjakan tugas sehingga dari pandangan guru-guru kurang baik, akan tetapi di sekolah memiliki BK. Lalu diberi pendekatan oleh BK memberikan motivasi dan pendekatan terhadap wali murid. Alhamdulillah peserta didik pun kembali ke sekolah, akan tetapi di titik akhir anak tersebut malas sekolah lagi sehingga tidak memenuhi nilai yang ada. Peserta didik pun akhirnya putus sekolah di bangku kelas 3 SMP karena tidak memenuhi nilai, malas sekolah, jarang mengerjakan tugas, kurang pendekatan dengan teman, kurangnya pendekatan dengan guru dan kurang pendekatan dari orang tua untuk keterbukaan belajar di sekolah. padahal orang tua Kholilah ini sudah memberikan motivasi, sudah memberikan keperluan sekolah yang ada Kholilah tidak mau sekolah. Dari cerita diatas bisa disimpulkan ketika proses pembelajaran harus rajin, sesulit apa pun pembelajaran kita setidaknya harus melaksanakannya, butuh pendekatan guru dan teman. Juga harus terbuka secara luas bila ada kendala dari sekolah. Karena peserta didik ini di sekolah cenderung pendiam.

Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Menanggulangi Putus Sekolah

Berita pendidikan cukup populer di kalangan masyarakat. Hal ini menjadi tanggung jawab beserta untuk mencari solusi atas perkara ini, termasuk pemerintah menawarkan program pendidikan, mulai dari anggaran, pendataan anak putus sekolah, hingga perbaikan infrastruktur. upaya untuk menekan angka putus sekolah, menyempurnakan kurikulum, dan menyelenggarakan pendidikan gratis, antara lain Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah putus sekolah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peruntukan beasiswa melalui BOS, KIP, cadangan Program Keluarga Harapan, atau bantuan komparatif potensial;
2. Masyarakat, tokoh masyarakat, dan DUDI didorong untuk mempercepat penyelesaian pendidikan berjenjang oleh pemerintah daerah dan kepala sekolah;
3. Dinas Pendidikan memberikan penyuluhan dan pengarahan kepada anak dari orang tua;
4. Menunda pemberian ijazah SMP hanya dengan menerbitkan surat keterangan lulus yang mewajibkan siswa mendaftar ke SMA untuk mendapatkan ijazah;
5. Dinas Pendidikan memberikan penyuluhan dan pengarahan kepada anak dari orang tua;
6. Menginspirasi siswa untuk tetap bersekolah dengan terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman. (KEMENDIKBUD, n.d.)

Ketika proses menjalankan peneliti ini harus ada izin dari pihak KESBANGPOL (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) untuk bisa masuk surat Dinas Pendidikan setelah di izinkan dari pihak Dinas peneliti meminta data ke pihak kurikulum untuk mengetahui data anak putus sekolah di Kabupaten Tangerang yaitu tahun 2021 SMP 1900 orang dan tahun 2022 SD dan SMP 2974 orang. Ada beberapa sekolah anak yang putus sekolah lalu dijadikan sempel untuk di wawancarai, tidak hanya itu peneliti juga mendatangi kecamatan dan kelurahan untuk mengetahui sebab akibat anak yang putus sekolah beliau menceritakan pemerintah sudah memberikan fasilitas terhadap anak yang kurang mampu seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

KESIMPULAN

Masih ada anak yang putus sekolah di wilayah Kabupaten Tangerang disebabkan karena faktor internal dan eksternal yaitu : (1) Anak yg berhenti sekolah sebab tak bisa bersosialisasi menggunakan lingkungan sekolahnya, (2) Imbas teman-temannya, ia diajak bermain beserta game seperti play station. (3) Ketika anak-anak dihukum karena terlambat ke sekolah, mereka putus sekolah. (4) Anak-anak dari keluarga miskin seringkali harus ikut membantu keuangan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. (5) Ketiadaan perhatian orang tua umumnya menyebabkan aneka macam dilema. Terjadi hubungan yang tidak harmonis antara orang tua (broken family). Akan tetapi dari wawancara peneliti akibat putus sekolah yaitu : anak sudah malas sekolah lebih memilih pesantren, tidak ada ketertarikan untuk lanjut sekolah lebih baik bekerja dan kurangnya anak dalam bersekolah menjadikan nilainya menjadi pertimbangan guru dan kurangnya keterbukaan dengan orang tua. Dari kasus di atas Pemerintah sudah jelas memberikan fasilitas anak untuk bersekolah seperti : (1) Meningkatkan peruntukan beasiswa melalui BOS, KIP, cadangan Program Keluarga Harapan, atau bantuan komparatif potensial. (2) Mempercepat penyelesaian pendidikan berjenjang oleh pemerintah daerah dan kepala sekolah. (3) Dinas Pendidikan memberikan penyuluhan dan pengarahan kepada anak dari orang tua, dan lain-lain.

SARAN

Pemerintah sudah memberikan fasilitas kepada masyarakat kurang mampu untuk anak putus sekolah anak tersebut harus bisa memanfaatkannya secara maksimal, dan harus belajar dengan sungguh-sungguh agar tercapai cita-citanya dan membanggakan keluarganya serta membanggakan kedua orang tuanya. Orang tua harus mendidik anaknya secara maksimal karena pendidikan yang sering dilakukan sebenarnya yaitu pendidikan informal adalah pendidikan keluarga, orang tua harus menjelaskan kepada anaknya bahwa pendidikan itu penting di era zaman ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahalli, I. J., & As-Suyuti, I. J. (2016). Tafsir Jalalain - Jilid 1, ASBABUN NUZUL AYAT Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra. Sinar Baru Algensindo, 1-1417.
- Ali Imron. (2014). Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah. Departemen Pendidikan Nasional.
- Bagong Suyanto. (2010). Masalah Sosial Siswa. Kencana.
- Depdiknas. (2008). Kamus besar Bahasa Indonesia. PT Gramedia Pustaka.
- Gunawan Ary. (2011). Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan. Rineka Cipta.
- Habe, H., & AHIRUDDIN, A. (2017). Sistem Pendidikan Nasional. Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis, 2(1), 39-45.
<https://doi.org/10.24967/ekombis.v2i1.48>
- Hidayat, R., Ag, S., & Pd, M. (n.d.). Buku Ilmu Pendidikan Rahmat Hidayat & Abdillah. Ignas Kleden. (2004). Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan. Penerbit Agromedia Pustaka.
- Ismail, I. ad-D. A. al-F. (n.d.). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2.
- Karim, M. (2009). Pendidikan Krisis. Cet. I, Ar-Ruzz Media.
- KEMENDIKBUD. (n.d.). Neraca Pendidikan Daerah.
- Munir Yusuf. (2018). Pengantar Ilmu Pendidikan. Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 126.
- RI, B. P. M. (2018). Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah (Vol. 4, Issue 1).
- Rusdiana, A. (2014). Kebijakan Pendidikan. Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Ke Implementasi, 21-316.
- Rushananto. (2014). Kebijakan Publik. Kebijakan Publik, 1993, 15.
- Simon Danes dan P. Hardono Hadi. (2000). Masalah-Masalah dalam Dunia Pendidikan Indonesia. Kanisius.
- Sukmadinata, N. S. (2005). Metode Penelitian Pendidikan. Remaja Rosadakarya.
- TANGERANG, B., & BANTEN, P. (2020). PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH KABUPATEN TANGERANG. In Kaos GL Dergisi (Vol. 8, Issue 75).
<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>
<https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>
<http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391>
<http://www.sciencedirect.com/science/ar>

ticle/pii/B9780857090409500205%0Ahttp:
TANGERANG, B., & BANTEN, P. (2021). PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH KABUPATEN TANGERANG.